

Pada pengertian lain yang dikemukakan oleh James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah

“a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or matter of concern “

(serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).(Islami : 2001) Pendapat terakhir yang dikemukakan oleh Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) *feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Selain ketiga definisi atau pengertian yang dikemukakan di atas sesungguhnya masih banyak lagi definisi yang lain, namun dari sekian banyak nampaknya tidak terdapat adanya perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari ketiga pendapat mengenai rumusan kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu (1) adanya serangkaian tindakan (2) dilakukan seseorang atau sekelompok orang (3) adanya pemecahan masalah dan (4) adanya tujuan tertentu.

Bila keempat elemen tersebut dipadukan maka dapat diperoleh sebuah pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau



“...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program ...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Kemudian Anderson mengemukakan bahwa “*public policies are those developed by governance bodies and officials*” (kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah). Dan terakhir dikemukakan oleh Jenkins dalam Wahab bahwa kebijakan negara yaitu : “*a set of interrelated decisions taken by a political actor or or group actor concerning the selection where these decisions should, in principle, be within the principle of these actors to achieve* ” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan, diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkembang dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dengan suatu situasi dimana keputusan-keputusan dari para aktor tersebut).

Dengan pengertian kebijakan negara tersebut di atas bagaimana rumusnya, pada hakekatnya bahwa kebijakan negara mengarah kepada kepentingan publik (*public interest*), dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Seseorang atau sekelompok orang aktor politik (*administator publik*) senantiasa memasukkan pikiran-pikiran publik dalam wacana politiknya, bukan hanya pikiranya atau kemauanya semata-mata sebagai pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan negara dapat disimpulkan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah baik yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (*publik*)

Dari beberapa pengertian kebijakan negara yang telah dikemukakan di atas Islami (2002) mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan negara (*public policy*), yaitu :

“The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”

Menurut Michael Howlett dan Ramesh mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa :

(Setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”. Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno mengemukakan bahwa “Suatu program kebijakan akan hanya

Istilah *good governance* merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersiat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi mneyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat). Prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan dari yang paling sederhana hingga yang berskala besar, seperti arisan, pengajian, organisasi kelas, hingga organisasi diatasnya.

Di Indonesia, wacana *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan transparan dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemerintahan juga bisa

- f. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
- g. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui sistem pendidikan.
- h. Menopang sistem hukum yang efektif yang menjamin perselisihan ditangani secara adil, tanpa bisa kearah negara atau kepala kepentingan-kepentingan swasta.

Menurut mas Ahmad Daniri, Ketua komite Nasional Kebijakan governance, pelayanan publik sangat strategis untuk menerapkan *good governance*, ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good governance*, pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak.

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

2.4.1. Komunikasi

Menurut Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001: 25), mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi

pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara (2001 : 18) menyatakan bahwa komunikasi adalah " suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu ".Sejalan dengan itu menurut Widjaja (2000 : 88) mengatakan bahwa Komunikasi adalah : " proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku ".Pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur – unsur sebagai berikut (Widjaja 2000 : 30) :

1. Sumber pesan, Adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.
2. Komunikator Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah, penguasaan bahasa.
3. Komunikan, Adalah orang yang menerima pesan.

pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001: 27). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins (2006 : 392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi antara lain (Umar, 2001: 27-28):

- a. Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat berupa pengarahan, perintah, inspirasi maupun evaluasi. Mediana bermacam-macam, seperti memo, telepon, surat, dan sebagainya.
- b. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporan pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapat pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. Mediana biasanya adalah laporan baik secara lisan maupun tertulis atau nota dinas.
- c. Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar anggota organisasi yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerja sama dan proaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebulatan. Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995: 41).

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk harus memperhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995: 43). Dalam struktur organisasi jika dikaitkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa dilihat dalam bagan dibawah ini :

2.4.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka

dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap input tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan input-input tersebut menjadi output-output yang memenuhi keinginan lingkungan. Dengan demikian, dalam organisasi terdapat kurang lebih tiga variabel utama, yang mempengaruhi organisasi, yaitu manusia, dan lingkungan, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Winarno (2002 : 138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

2.4.4. Sikap Pelaksana

Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan, yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan l dengan suatu reaksi yang wajar Mas'ud (1991: 31). Adam (2000:36) menyebutkan bahwa sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan dari situasi atau seseorang.

sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan sikap sebagai berikut : ” Sikap (*attitude*) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya”.

